



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

| | | |
|------------------|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : | I |
| Rapat Ke | : | 9 |
| Jenis Rapat | : | Rapat Paripurna |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari, Tanggal | : | Jumat, 30 Oktober 2015 |
| W a k t u | : | Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. |
| Ketua Rapat | : | Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI Didampingi 1. Drs. Setya Novanto, Ak. : Ketua DPR RI 2. Fadli Zon, S.S., M.Sc. : Wakil Ketua DPR RI 3. Dr. Agus Hermanto : Wakil Ketua DPR RI 4. Fahri Hamzah : Wakil Ketua DPR RI |
| A c a r a | : | 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 2. Persetujuan Pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan. 3. Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2015-2016. (Didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI) |
| Sekretaris Rapat | : | Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Dra. Damayanti, M.Si Deputi Bidang Persidangan 2. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. Kepala Badan Keahlian 3. Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan 4. Dr. Dewi Barliana S., M.Psi Kepala Biro Pimpinan 5. Dra. Mitra Anindyarina. Kepala Bagian Persidangan Paripurna |
| Hadir Anggota | : | 485 izin 39 dari 556 orang Anggota |

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 10.10 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak **Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.**, dihadiri oleh 485 Orang dari 556 Orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah:
 - 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Persetujuan Pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 3) Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2015-2016.
3. Rapat Paripurna didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI saudari **Dr. Ir Hetifah, M.P.P.**, menggantikan Saudari dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG. dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. dan Saudara **Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.** menggantikan Saudara Ir. Abdul Hakim, M.M. dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Lampung II serta Saudara **Muhammad Martri Agoeng, S.H.** menggantikan Saudara Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M. dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV.
4. Pimpinan Dewan menerima tiga pucuk surat yaitu:
 - 1) Surat dari Presiden RI Nomor R-62/Pres/10/2015 tertanggal 19 Oktober 2015, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara sahabat untuk RI.
 - 2) Surat dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Nomor 632/BALEG/DPR RI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015, perihal Penundaan Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap usulan Perubahan Kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
 - 3) Surat dari Pengusul Hak Angket tertanggal 28 Oktober 2015, perihal Pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan.

Untuk surat yang **pertama** sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, sedangkan untuk surat **kedua** dan **ketiga** sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Keputusan Rapat Paripurna

1. DPR RI dapat menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dengan catatan, bahwa seluruh catatan fraksi-fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Undang-undang tentang APBN TA 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dikembalikan lagi kepada Komisi-komisi terkait yang akan dibahas di dalam APBN-P Tahun 2016 yang akan datang.

3. Rapat Paripurna menyetujui terkait kebakaran lahan dan hutan yaitu:
 - 1) Apapun yang merupakan hak anggota, hak eksklusif bersama anggota tetap harus dihargai dan dihormati sesuai dengan kaidah-kaidah Undang-undang MD-3.
 - 2) Bawa prinsipnya ini adalah salah satu bentuk kepedulian bersama terhadap proses maupun kondisi keprihatinan karena adanya bencana asap yang tentunya ini menjadi masalah dalam kaitannya merespon keresahan maupun derita masyarakat yang sedang mengalami bencana asap tersebut. Dengan segala hormat kita tetap menempatkan dan menghargai usulan interpelasi dari pengusul dan disepakati ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh pengusul untuk dilengkapi persyaratanya lebih detail kembali dan sesuai mekanisme Tata Tertib. Dalam kaitan ini telah disepakati untuk draf maupun dokumentasi usul interpelasi tersebut untuk sementara dikembalikan kepada pihak pengusul, dan setelah masa reses akan dibahas dan diumumkan kembali.
4. Rapat Paripurna Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2015-2016. Masa Reses ini akan berlangsung mulai tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 dan Masa Persidangan berikutnya akan dimulai pada tanggal 16 November 2015.

C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 21.55 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2015

KETUA RAPAT



DR. IR. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

19

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke – 9
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016
Jum'at, 30 Oktober 2015**

| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|--|--|------------------------|
| KETUA RAPAT : Saya harapkan, kita kembali kepada agenda kita, saya serahkan sepenuhnya kepada seluruh Anggota mau memakai atau tidak itu persilakan. Tetapi tentunya ini dikembalikan lagi pada posisi masing-masing. Kita akan segera mengusahakan agenda Rapat Paripurna pada siang hari ini yang begitu penting, begitu dinanti masyarakat, sehingga kami persilakan sepenuhnya, apa yang ada dihati masing-masing seluruh Anggota yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, sebelum itu kami persilakan kita memberikan sesuatu hal dalam kaitan agenda rapat ini tentunya akan diberikan suatu harapan kepada kita semua sebagai bentuk solidaritas dan empati seluruh DPR, kami persilakan kepada Ketua DPR yang terhormat, untuk memberikan pandangan sekilas sebelum dimulainya acara Paripurna pada siang hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. | | |
| KETUA DPR : Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota dan hadirin sekalian, Kita menyaksikan beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah sedemikian masif, tidak saja menimbulkan korban pada masyarakat kita, tetapi juga biaya besar untuk mengatasinya. Sehubungan dengan itu, Pimpinan Dewan mengimbau kepada seluruh Anggota DPR untuk dapat berempati, membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban asap, untuk bersama-sama memberikan sumbangan, baik secara langsung melalui kotak sumbangan yang sudah kita taruh di beberapa tempat, baik secara langsung melalui sumbangan yang telah disediakan maupun melalui transfer ke rekening khusus Setjen DPR RI atas nama Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI di nomor rekening Bank Mandiri 122-00-070-60-50-5 sebagai langkah awal Pimpinan sudah mulai dengan menyumbang masing-masing Pimpinan sebesar Rp.10.000.000,-. Jika Bapak-Ibu Anggota ingin memberikan sumbangan ini melalui pemotongan dari tunjangan kehormatan besarnya saya persilakan dan kerelakan masing-masing dapat dilakukan oleh Setjen DPR RI dengan persetujuan Bapak dan Ibu Anggota, selanjutnya sumbangan ini akan disampaikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang terkena dampak langsung, disamping itu dukungan moril, do'a kita bersama juga penting oleh karena itu kami mengajak seluruh Anggota DPR, Pegawai Setjen dan hadirin semua untuk bersama-sama untuk melaksanakan sholat istisqo setelah sholat Jum'at hari ini di lapangan bola DPR, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat untuk memimpin rapat pada hari ini. | | |
| KETUA RAPAT : Sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menyampaikan interupsi, pasti kami akan kami beri kesempatan, tadi ada imbauan. Sekali lagi ini sifatnya adalah himbauan. Kami persilahkan pada seluruh keikhlasan dari Bapak-Ibu sekalian untuk menangkap, mencerna dan mengamati atau menindaklanjuti imbauan tersebut. Tentunya ini menjadi suatu hal keinginan kita semua termasuk didalam kaitan agenda Rapat Paripurna kita pada siang hari ini, yang salah satunya adalah sesuai dengan hasil Rapat Bamus kemarin adalah penyampaian untuk pembentukan kaitan dengan aspirasi teman-teman di Komisi IV. Maka dari itu kami mengharapkan sekalian untuk memberikan kesempatan kepada proses lebih lanjut terkait dengan agenda kita pada siang hari ini, yang tentunya diawali diluar dari 3 agenda tadi adalah ada prosesi Penggantian Antar Waktu, nanti setelah itu kami beri kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menyampaikan interupsi tentunya secara tertib, secara berurutan dan sesuai apa yang akan kaedah apa yang akan disampaikan. Setuju? Ketok palu. | | |
| ANSHORY SIREGAR, Lc A-87/F-PKS/DAPIL: SUMUT III | Salam sejahtera buat kita semuanya, Sewaktu periode lalu Pimpinan, ada bencana Gunung Sinabung, kemudian saya usulkan agar Dapil Sumut menyumbangkan seluruh gaji pokoknya. Kemudian selain | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|------------------------|
| | <p>Sumut, menyerahkan setengah gaji pokoknya dan disetujui oleh Paripurna. Sekarang ini itu hanya sekecil Karo, Brastagi, kalau asap ini Pimpinan, berapa provinsi dan berapa pulau, saya mengusulkan, agar gaji pokok kita semuanya, selama satu bulan, kita sumbangkan buat asap, saya usul Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| IRMAN SURYANI A-7/F-P NASDEM/DAPIL: SUMSEL II | <p>Terima kasih Pimpinan, Saya ingin sampaikan diforum ini bahwa untuk kepedulian terhadap asap, kami dari koalisi Rakyat Peduli Asap, saya pribadi sudah membuat lima rumah evakuasi asap sebelum DPR ini menyatakan dukungan, memberikan sumbangan kepada korban asap. Kami sudah membuat 5 rumah evakuasi, itu yang pertama; Yang Kedua : yang ingin saya sampaikan bahwa tidak sopan juga ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pimpinan menutup mulutnya, lagu Indonesia Raya itu harus dinyanyikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hikmat; 2. Dinyanyikan dengan penuh kehormatan; <p>karena itu adalah martabat bangsa Pimpinan, terima kasih.</p> | |
| ARIA BIMA A-176/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATENG V | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan yang saya hormati dan kawan-kawan Anggota yang saya hormati, serta tamu Pemerintah;</p> <p>Saya mengapresiasi hal yang disampaikan Saudara Pimpinan, mengenai bagaimana kita berempati terhadap korban kabut asap. Tapi satu hal yang lebih penting, kita sebagai Anggota Dewan bukan hanya <i>charity</i> tetapi bagaimana kebijakan kita khususnya hari ini kita bicarakan politik anggaran. Sorotan publik itu lebih daripada fungsi kita mengalokasikan anggaran dinegara yang frekwensi bencananya itu besar, kalau ngga banjir, gempa, kalau ngga gempa, sekarang model baru adalah asap. Ini mari kita perhatian secara penuh terhadap politik anggaran kita. Untuk hal-hal yang menyangkut bencana dengan melihat kondisi alam dimasing-masing wilayah dengan mengalokasikan budget anggaran, ini yang utama. Yang bersifat sosial, itu empati kegotongroyongan untuk menyambung tali kemanusiaan kita sebagai Anggota Dewan dengan rakyat yang menderita. Namun satu hal Pimpinan, supaya kita ini tidak kaget, tiba-tiba ada masker di hadapan kita, dan tiba-tiba ada usulan kita berempati di Paripurna, saya berharap hal semacam itu dibicarakan lebih dulu dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi kalau perlu atau di Bamus. Mohon maaf ini tanpa menghilangkan substantif ajakan Pimpinan, karena ini adalah agenda Paripurna yang semua hal itu harus didasari atas keputusan Bamus atau Pengganti Rapat Bamus Pimpinan. Demikian hal yang kami sampaikan, supaya kedisiplinan dan</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|---|
| | <p>ketertiban agenda rapat ini, terus bisa tidak memunculkan hal-hal yang seperti tadi, substansinya Pimpinan bagus mengajak empati, tetapi akhirnya yang muncul lagu Indonesia Raya pakai masker, macam-macam, mungkin sebagian Pimpinan atau Anggota ini kaget tidak mengerti ada apa ini, kaitan masker, solidaritas kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H A-140/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: LAMPUNG II | <p>Baik terima kasih. Saudara Pimpinan dan kolega segenap Anggota DPR RI yang saya hormati, Terkait dengan asap dan menggunakan masker, kita semua berempati terhadap masalah asap, tetapi saya harapkan tidak dalam bentuk sensasi-sensasi menutup muka dan mulut dengan menggunakan masker dalam memimpin Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Sidang Paripurna dan itu bisa digolongkan <i>Contemp of Parliament</i>. Oleh karena itu, saya lihat masih ada Pimpinan yang tidak menghiraukan, sementara beberapa Anggota sudah mengimbau agar masker itu tidak dipergunakan didalam memimpin didalam persidangan ini, jadi saya minta supaya dengan tidak mengurangi rasa empati terhadap hal yang dimaksud, saya minta masker itu dilepas karena besok kita bercadar, besok kita menggunakan topi koboy seperti LSM, jangan melakukan hal-hal yang tidak patut dipersidangan ini, terima kasih Pimpinan.</p> | |
| KETUA RAPAT : Jadi saya pikir masalah sebelum ke Pak Johnny, masalah kaitan dengan aksi solidaritas, emansipasi, tentunya sudah kita terima, kita tampung, tetapi ini adalah sebagai konsideran, proses solidaritas tidak ada maksud lain. Kami harapkan setelah ini kita sama-sama khusu sholat jum'at, sholat istisqo sebagai bentuk solidaritas kita untuk bisa memberikan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Setuju, ya. Pernah, sebentar-sebentar. Saya minta mohon tertib. Saya kembalikan secara imbauan tidak ada paksaan, tetapi kita hargai semua. | | |
| JOHNNY G PLATE, S.E A-27/F-P NASDEM/DAPIL : NTT | <p>Terima kasih Pimpinan, Masih terkait asap Pimpinan, Kita semua mengetahui ada ratusan ribu rakyat kita yang susah bernafas, yang masih susah yang berada di lokasi-lokasi area-area berdampak asap, kita semua mengetahui bahwa saat ini Pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat lagi berperang melawan asap, kita semua mengetahui bahwa semua kita mempunyai konsentrasi tinggi dan berharap sepenuhnya agar masalah asap dapat segera terselesaikan. Menjadi sangat lucu dan aneh pada saat masalah asap, masalah</p> | KETUA RAPAT: Rekan-rekan sekalian, saya pikir tadi bagian awal sudah kita sampaikan, mohon kita coba kontemplasi satu detik. Jadi saya harapkan kita kembali kepada agenda kita, semuanya adalah maksud niatnya baik, tidak ada hal-hal yang diluar |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|--|
| | <p>ratusan ribu rakyat yang sedang mengalami kesulitan bernafas, kita bawa sebagai dagelan politik dalam ruang Sidang yang istimewa ini. Kami sangat kecewa dengan sikap-sikap simbolis yang kita lakukan hari ini, yang bahkan sampai lagu kebangsaan kitapun, kita rendahkan derajatnya. Kami minta dengan segala hormat, agar masalah asap ini jangan menjadi point atau topik yang dipolitisasi diruang sidang ini, jangan kita mengalihkan masalah asap dari lokasi-lokasi asap yang dimana bermukim ada ratusan ribu rakyat kita. Kami minta agar waktu kita diruang sidang ini kita gunakan untuk segera menyelesaikan agenda penting kita, agenda nasional kita untuk segera mensahkan UU APBN 2016, terima kasih Pimpinan.</p> | <p>dari apa yang tersirat, maupun yang tersurat. Intinya aksi batas kita kembalikan pada format, keiklasan, maupun kaitan dengan iimbauan saja, jadi seperti itu, silakan yang lain. Silakan yang terakhirnya ya, khusus? Saya harapkan tidak tahu dengan yang lain.</p> |
| H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH., M.Si A-220/PDI PERJUANGAN/DAPIL:KALTENG | <p>Baik Pimpinan, Terima kasih Pimpinan, Kami ucapan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang ada disini dan saya hampir setengah bulan pulang-pergi didaerah, janganlah jadikan masyarakat Kalimantan Tengah atau masyarakat lainnya terhadap kabut asap ini menjadi panggung politik dan pencitraan saja, masyarakat kami itu menunggu aksi nyata, menunggu tindakan nyata, khususnya terkait dengan RAPBN 2016 kami ingin tunggu program kerja itu ke daerah, untuk itu kami berharap secara arif dan bijaksana, Anggota DPR pada hari ini dapat secara tegas dan lugas memberikan kesempatan kepada Pemerintah saat ini untuk memberikan program secara luas dan kemudian juga yang hadir disini, itu yang ditunggu masyarakat, kalau ada apresiasi gaji pokok mau disumbangkan mau semua gaji kita dibagikan, kami terima kasih yang sebesar-besarnya, tetapi yang lebih konkret dan lebih masif yang dan terstruktur dengan sistem acara program nyata yang kami tunggu dari program kabinet kerja yang disusun 2016 ini dan kami akan lihat apakah nanti dibidang kesehatan benar-benar turun ke kecamatan, ada tidak obat-obatan di kecamatan, ada tidak fasilitas kesehatan di kecamatan, kalau hanya sampai kabupaten, Menteri Kesehatan ganti saja, diganti Menteri Kesehatannya karena kami baru turun dari Kapuas bahwa di Puskesmas itu jadwal kerja hanya jadwal biasa, tidak 24 jam buka, ini menunjukkan bahwa Menteri Kesehatan belum sinergi lagi terhadap hal tersebut, itu saja kami tunggu hasil nyata, terima kasih.</p> | |
| SUPRATMAN, S.H., M.H A-388/F-P GERINDRA/DAPIL: SULTENG | <p>Pimpinan yang saya hormati dengan seluruh Anggota yang saya hormati pula, Asap ini adalah merupakan bencana Pak, ini butuh perhatian yang sungguh-sungguh dari semua lembaga-lembaga negara termasuk DPR, oleh karena itu saya mengapresiasi atas inisiasi Pimpinan DPR dalam rangka membuat simbolisasi terhadap bencana yang terjadi saat ini. Kita bisa melihat hari ini apa yang</p> | <p>KETUA RAPAT: Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak-Ibu yang akan melakukan interupsi, saya mohon dengan</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|--|
| | <p>disampaikan teman-teeman dari Kalsel tadi, itu sudah menyatakan bahwa kita butuh dukungan yang riil dari DPR, bukan hanya simbol, tapi kita ingin mengingatkan kepada Pemerintah secara kritis. Hari ini di Koran Tempo menyatakan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, itu nyata-nyata dinyatakan didalam sebagai tersangka, oleh karena itu kita berharap, ini merupakan kesungguhan yang kita harapkan dari Pemerintah sekali lagi dan mudah-mudahan gerakan simbolisasi yang ada di DPR ini bisa diwujudkan dalam kerja nyata, demikian terima kasih.</p> | <p>sangat, dengan segala kerendahan hati. Terkait dengan interupsi, seandainya permasalahan kaitan dengan rencana kita masalah solidaritas, masalah asap, tentunya kita harapkan atas kesediaan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa nanti kita sampaikan pada saat ditengah-tengah acara persidangan kita, setuju ya? Ketua Rapat: ketok palu.</p> |
| H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE A-29/F-P NASDEM/DAPIL: KALBAR | <p>Berkaitan dengan agenda, Pertama : saya menyampaikan apresiasi tadi Pimpinan sudah membuat aksi simpati, cuma sayang terlambat pak, kalau satu bulan yang lalu mungkin mendapat respon dari pada masyarakat, karena kami juga dari Kalimantan Barat merasakan itu; Kedua : Berkaitan dengan hak usul pansus disampaikan sejak kemarin, saya sudah menyampaikan karena inisiatif dan perantara saya yang baik dari Anggota DPR ingin membantu Pemerintah sifatnya, dalam rangka menangani persoalan ini, makanya Fraksi NasDem sejak kemarin sudah mengusulkan tidak perlu pakai pansus atau interpelasi, cuma dilihat dari tahapan-tahapan interpelasi, didalam MD3 begitu cukup rumit dan panjang, padahal kita di DPR ini cukup banyak, masih pekerjaan yang belum kita selesaikan, masyarakat sudah menunggu bagaimana regulasi yang ada dikita masih sampai saat ini cukup sebagian kecil, maka pada waktu Pak Fahri mengatakan pada hari ini cukup saja kita menyampaikan hak bertanya kepada Presiden yang disampaikan oleh pengusul bukan pansus sifatnya. Kalau ini sudah sampai ke pansus, apalagi saya sudah mendapat undangan hak interpelasi, berarti tahapan-tahapan ini harus kita lalui. Sehingga dengan demikian persoalan asap perlu kami bawahi persoalan asap ini bukan masalah kebijakan, bukan persoalan pemerintah sekarang ini, tapi ini cukup panjang persoalannya, ada regulasi yang tidak selesai, ada persoalan sampai terjadinya asap itu karena saya merasakan orang Kalimantan Pak!. Dua puluh tahun yang lalu tidak ada asap karena masyarakat masih bertani secara tradisional, tapi setelah kebun-kebun masuk dengan regulasi diberikan kemudahan ada persoalan disitu, inilah akibatnya bencananya sekarang, makanya apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan hal itu, itu saja. Makanya Fraksi NasDem menolak untuk hak interpelasi itu, cukup dengan panja yang ada, terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|---|
| Dr. Hj. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si A-432/F-PD/DAPIL: JATIM V | <p>Berkaitan dengan tadi, hak interpelasi, angket ataupun apa, ini agenda tadi saya kira kita tidak perlu alergi atau tidak boleh karena ini sesuai dengan fungsi kita;</p> <p>Yang Kedua : saya ingin mengingatkan Anggota DPR yang mulia dan Pemerintah ketika menangani kasus jatuhnya Air Asia, Pemerintah begitu bersemangat hingga menghabiskan anggaran 1 triliun, Wapres sendiri yang memimpin, Panglima TNI sendiri yang kesana, sampai mayat-mayatnya yang sudah jatuh dilautpun, diambil diangkat. Padahal semua agama kalau mayat sudah dilaut, sebaiknya kita do'akan bersama, tetapi cara menangani asap sangat berbeda dengan cara Pemerintah menangani jatuhnya Air Asia. Saya ingin mengingatkan Pemerintah, ini adalah komitmen kita bersama kalau dianggap rakyat Indonesia pelupa, paling tidak kami Fraksi Partai Demokrat bukan pelupa, itu saja Pimpinan. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan hak asasi manusia (human rights) mau memakai masker, tidak memakai masker diruangan ini, itu tidak melanggar Tatib, tidak melanggar MD3. Mari kita sama-sama pikirkan saudara-saudara kita yang tidak hanya ratusan ribu tapi jutaan menderita disana, terima kasih Pimpinan.</p> | <p>KETUA RAPAT : Baik terima kasih Bu Nurhayati, jadi kita mungkin mendengarkan terlebih dahulu pihak pengusul. Saya persilakan kepada pengusul terkait dengan apa yang telah termaktub dalam agenda kita, kepada Saudara Viva Yoga Mauladi, M.Si. untuk menyampaikan terkait dengan usulan yang telah disampaikan dalam Rapat Bamus kemarin, waktu dan tempat kami persilakan atau dari unsur Pengusul untuk mewakili terkait yang disampaikan sudah 3 kali di beri kesempatan, maka acara di swit Panggar dahulu, setuju? Ketok palu.</p> |
| Drs. ABDUL FIKRI, M.M A-112/F-PKS/DAPIL: JATENG IX | <p>Karena ini menjadi dokumen yang tak terpisahkan dari RUU maka saya perlu meluruskan, ada di halaman 18, supaya diubah, point 9, itu KSM jumlahnya 6 juta, padahal sudah diubah menjadi 5 juta, dan meningkat menjadi 1.5 juta tambahnya bukan 2.5 juta karena ini melekat; kemudian ini</p> <p>Yang Kedua : ada sesuatu yang tidak terungkap keluhan dari masyarakat, tidak terungkap, tidak terdokumentasikan didalam, tetapi ini keluar atau aspirasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meskipun APBN sudah diketok setiap tahun, tetapi ada keluhan dari Guru Agama bahwa negara ini punya hutang 1 triliun, 1,3 triliun yaitu belum bayar tunjangan profesi guru ada 1 triliun dengan berbagai agama, kemudian Guru Katholik 48 miliar, ini untuk menjadi catatan juga diluar catatan yang sudah disampaikan oleh Banggar. Kemudian mereka butuh tapi tidak mau ramai-ramai dan tidak mau bikin gaduh, tidak akan demo tetapi jangan abaikan mereka hanya karena mereka sekarang diam dan tidak demo tapi negara tidak bayar; 2. Ada keluhan juga APBN sudah di <i>dok</i> disetujui, tapi tunjangan gaji 13 untuk profesi seperti tenaga ahli disemua instansi itu ternyata gaji ke-13 tidak dibayarkan tahun yang lalu, ini juga jadi catatan. Kemudian ada lagi juga menyampaikan ke DPR dan ini juga tidak tersampaikan didalam dokumen itu adalah bahwa ada lembaga yang dibuat oleh Pemerintah namanya Badan Wakaf | <p>KETUA RAPAT : Wala'ikumsalam Wr.Wb. Baik, terima kasih pada Saudara Fikri.</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|-----------------|
| | <p>Indonesia, tapi sampai sekarang honorpun belum dibayarkan, ini juga untuk menjadi catatan;</p> <p>3. Kemudian yang lain adalah keluhan dari para Ketua RT, Ketua RW, Kades, Lurah, Kuwu, mereka dituduh tidak adil, dituduh menyurat bantuan, pilih kasih dengan pembagian bantuan kepada KSM tadi <i>Conditional Cash Transfer</i>, sekarang dari 3,5 juta menjadi 5 juta. 3,5 juta saja mereka terus begitu, dituduh seperti itu oleh karenanya supaya sekali lagi catatan untuk memperbaiki data, supaya yang berhak mendapatkan bantuan ya yang berhak, bukan seperti yang sekarang ini, maka yang dituduh akhirnya adalah Ketua RT, Ketua RW, Kades dan Lurah bahwa mereka dituduh tidak adil, padahal karena memang daftarnya yang tidak beres hanya menggunakan tahun 2011. Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M A-122/F-PKS/DAPIL: SULSEL II | <p>Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Bapak-Ibu yang saya hormati,</p> <p>Pertama, saya kira kita sudah mendengarkan bahwa hampir 9 fraksi menyatakan keberatan terhadap penyertaan modal negara, terhadap BUMN dimana dicantumkan bahwa ada sekitar 48,3 triliyun untuk RAPBN 2016. Saya kira ini merupakan langkah yang besar dan mengusik, bahkan mungkin melukai rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan perhatian negara melalui instrument APBN, oleh karena itu saya sepakat dengan Menteri Keuangan bahwa untuk penempatan PMN ini di hall ataupun pending, sehingga tidak untuk ditempatkan pada BUMN kita dan kita berharap bahwa dana tersebut nantinya akan digunakan untuk masyarakat kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini ekonomi kita mengalami kesulitan, dimana pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah;</p> <p>Yang Kedua, dari sisi perencanaan dan pengalokasian anggaran di RAPBN 2016, menurut kami kurang tepat sasaran dan kurang memperhatikan skala prioritas dan skala yang mendesak, terbukti bahwa pada saat ini kita mengalami bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, namun kalau kita melihat anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di RAPBN 2016 mengalami penurunan. Ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan karena kita berharap bahwa sebenarnya di tahun 2016 tidak ada lagi kebakaran hutan, tidak ada lagi masalah asap, oleh karena itu kita berharap program 2016 harus ada program untuk pencegahan dan program mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan kita mempertanyakan keseriusan daripada Pemerintah dengan alokasi anggaran yang mengalami penurunan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kira</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|---|
| EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A A-335/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMSEL I | <p>demikian Pimpinan, terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Terima kasih Pimpinan, Pimpinan dan teman-teman Anggota Paripurna yang kami hormati, Kami menggarisbawahi tentang keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan pemadaman api, menyelesaikan permasalahan di 43 juta lebih masyarakat kita yang berdampak langsung yang terhadap asap, namun keseriusan Pemerintah itu tidak disertai dengan semangat berpihakan disektor anggarannya, dimana anggaran Kementerian Kehutanan yang dalam catatan kami di Komisi IV berharap minta 12 triliun lebih dalam rangka pencegahan pembangunan infrastruktur dan sebagainya diharapkan kedepan tidak ada lagi terjadi kebakaran-kebakaran lahan lagi, namun Pemerintah hanya memberikan 6,3 triliun, 6,3 triliun itu sama dengan Rp.52.500,- perhektar hutan di Indonesia diawasi tiap tahun Pimpinan. Ini sangat tragis dan sangat menyedihkan. Belum puas kita dengan itu, kita mengirim surat 3,5 triliun untuk mendapatkan tambahan, tapi sampai sekarang belum ada gubrisan dari Pemerintah. Alih-alih ditambah malah anggaran kehutanan sekarang dikurangi 187 miliar Pimpinan, apakah ini cara DPR menangani permasalahan asap? Kami mengajak teman-teman DPR secara kompak untuk bisa melihat anggaran ini secara jernih, kalau Pemerintah tidak mengalokasi secara tegas terhadap penanganan ini, lebih baik kita secara bersama-sama kita tolak anggaran ini; Yang Kedua : sebagai lembaga yang menjadi contoh dan perwakilan di masyarakat Indonesia, DPR harus pertama kali turun tangan untuk memberi contoh ke lembaga-lembaga lainnya, sehingga saya menyikapi juga terhadap anggaran di DPR RI Pimpinan, saya mensinyalir ada anggaran yang masuk sebesar 700 miliar untuk pembangunan gedung. Kami Fraksi Gerindra masih minta untuk ditolak itu, dikurangkan dikembalikan lagi untuk kepentingan yang lebih penting lagi. Demikian Pimpinan terima kasih, dari kami.</p> | |
| Dr. Hj. ANNA MU'AWANAH A-74/F-PKB/DAPIL: JATIM IX | <p>Terima kasih Pimpinan,</p> <p>Untuk kita bersama, seyogyanya fraksi balkon tidak melakukan teriak-teriak ada dibalkon, mohon maaf Pamdal bisa menertibkan, karena percayalah kita disini mengawal program Pemerintah. Mohon ijin fraksi balkon seyogyanya tidak melakukan teriak-teriak bukan pada tempatnya, mohon Pamdal menertibkan, terima kasih Pimpinan.</p> | KETUA RAPAT : Oh... kirain mau interupsi, silahkan. |
| H.R. MUHAMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum A-326/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMUT I | <p>Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,</p> | |

| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|-------------|--|------------------------|
| | <p>Rekan Pers, Cetak dan Elektronik,</p> <p>Pertama, saya ingin memberi apresiasi terhadap 2 (dua) hal, apa yang tadi ditunjukkan oleh Pimpinan dengan memakai masker, walaupun banyak mendapatkan tudingan, tapi saya mengapresiasi, paling tidak saya diingatkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat asap;</p> <p>Apresiasi saya yang kedua tadi dilaksanakan sholat istisqo, bahwa kita masih membuktikan sebagai bangsa yang religius, meyakini bahwa bencana yang kita alami hari ini merupakan bagian dari peringatan dari Allah, Tuhan YME. Kemudian Pimpinan, ini akan sampai pada tahap pembahasan untuk persetujuan atau tidak setuju, saya ingin memberi catatan begini, dari 10 fraksi, 9 fraksi memberikan catatan terhadap PMN yang dikucurkan kepada BUMN. Memang ada yang sekedar hanya leverage untuk memberikan semangat modal bagi BUMN, tetapi dari penyampaian Bapak Supit tadi dan saya konfirmasi di catatan yang ada pada saya, bahwa catatan terhadap keberatan PMN dikucurkan ke BUMN tidak hanya sekedar untuk memberikan semangat, tapi ada yang malah memberikan saran, bahwa ini bisa dilanjutkan kalau ada jaminan Pemerintah kemudian merealokasi PMN kepada program-program yang lebih pro rakyat, itu artinya ketika belum ada penjelasan dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan bahwa PMN itu akan direalokasikan ke program-program yang jelas-jelas langsung menyentuh kepada kepentingan rakyat. Menurut saya, kita belum bisa melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan setuju atau tidak setuju. Sebagai catatan memang banyak hal yang sangat aneh dalam APBN kita hari ini. Kami misalnya di Komisi VIII mendapatkan sebuah fakta, hari ini Pemerintah menyatakan darurat kejahatan terhadap anak, maka sudah ada usulan menambah hukuman kebiri bagi pedofil yang memang masih pro dan kontra itu. Ini artinya, Pemerintah harus memberikan penanganan serius terhadap kejahatan anak ini, tapi penanganan yang serius itu harus ditandai juga dengan pengalokasian dana yang memadai. Kita ingin memberikan gambaran, anggaran Menteri PP dan PA 2015 itu hanya 217 miliar dengan pembahasan di Komisi VIII, kami mengusulkan penambahan 1 triliun, sehingga menjadi 1,2 triliun, tapi kemudian Pemerintah menunjukkan ketidak konsistenannya terhadap ungkapannya sendiri bahwa Indonesia berada dalam darurat anak karena dana itu ternyata kemudian dipotong sampai 500 miliar;</p> <p>Yang kedua, ruh kegiatan Kementerian Agama kami melihat ada di Bimas, baik Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha karena itu adalah diskusi kami di Komisi VIII diberi anggaran yang tidak banyak, tapi menurut para pimpinan disana Dirjen</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|-----------------|
| | <p>Bimas ini bisa kemudian melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengawal moralitas bangsa ini, ternyata Pemerintah yang kemudian bertekad merevolusi mental ini malah memangkas anggaran untuk Bimas Agama ini, sehingga kemudian para Dirjen kehilangan program yang sangat urgent untuk mengawal moral bangsa, belum lagi persoalan yang menyangkut pendidikan madrasah, yang menurut UU Pendidikan tidak ada diskriminasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun merupakan keikutsertaan masyarakat tetapi faktanya Pemerintah tidak hadir dalam pendidikan di madrasah-madrasah ini karena satu madrasah negeri itu berbanding dengan 20 madrasah swasta tapi guru-guru di madrasah swasta itu masih ada yang berpenghasilan Rp.75.000 per-bulan, padahal mereka tamatan S1. Ini anggaran berkali-kali diusulkan untuk ditambah kepada Pemerintah, tetapi Pemerintah tidak peduli dan ternyata kita melihat, ternyata Pemerintah merencanakan hal yang lain, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi malah akan dikucurkan kepada BUMN, padahal kita berharap PMN ini menjadi bagian terpenting untuk memberikan deviden kepada negara ini, dan baru kali ini saya lihat kemudian begitu ngotot malah untuk mengambil uang rakyat lewat APBN. Karena itu Pimpinan, saya ingin memberi catatan sebelum ada kejelasan sikap dari Pemerintah bahwa akan ada realokasi anggaran PMN itu pada program-program yang jelas pro kepada rakyat, menurut saya lanjutan kita untuk mengambil keputusan setuju atau setuju tidak bisa diteruskan karena bisa saja fraksi yang mengisyaratkan persetujuan kalau ada kejelasan dari Pemerintah tentang realokasi ini akan berubah pikiran sama dengan Gerindra, menolak APBN 2016, terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| H. MOH. NIZAR ZAHRO, S.H A-374/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM XI | <p>Pimpinan DPR yang saya hormati, Rekan-rekan Anggota DPR yang saya hormati, Menegaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Banggar tadi, ada sesuatu yang kurang. Pertama, bahwa Fraksi Gerindra menolak secara tegas RUU APBN Tahun 2016 beserta lampirannya dari Pasal 1 sampai Pasal 45, lampiran yang saya maksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran tentang proses pembiayaan PMN sebesar 62 triliun, kita ingat bahwa Bank Century dengan hanya 5 triliun begitu gaduhnya Republik Indonesia ini, kalau pembiayaan PMN sampai 62 triliun betapa gaduhnya Republik Indonesia ini. Namanya pembiayaan bisa untung, bisa rugi, kalau untung selamat Republik ini, kalau rugi siapa yang bertanggungjawab? Oleh karena itu perlu ditegaskan apa | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|-----------------|
| | <p>yang disampaikan oleh Ketua Banggar tadi, bahwa Fraksi Gerindra menolak pasal per pasal, dari Pasal 1 sampai Pasal 45 beserta lampirannya, karena itu menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya ingatkan juga dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan ada surat keputusan bersama Mendagri, Menkeu dan Menteri Desa bahwa itu adalah keputusan yang menyalahi UU Nomor 6 Tahun 2014, karena UU No.6 Tahun 2014 memerintahkan bahwa Pemerintah Desa wajib untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Desa bersama dengan RAPBDS, dengan mudahnya hanya dengan membuat SKB bersama antara 3 kementerian itu yang tujuannya untuk bisa segera mencairkan dana desa dan bisa memutar uang desa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya ingatkan lagi kepada Pimpinan, bahwa apa yang disampaikan Ketua Banggar tadi masih ada yang kurang dan kekurangannya sudah saya jelaskan dari awal;</p> <p>2. Yang terakhir kalinya bahwa UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 12 ayat 1, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. Selama ini Pemerintah belum pernah memohon maaf kepada rakyat Indonesia bahwa dia tidak berhasil menghimpun pendapatan negara yang disampaikan sesuai dengan Nota Keuangan Presiden beserta RUU APBN-nya karena tidak berhasil menghimpun pendapatan negara yang sesuai dengan Nota Keuangan, maka Fraksi Gerindra menganggap ini adalah inkonstitusional dan inkonsistensi, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Ketua Banggar dan dengan lampirannya yang tidak terpisahkan. Kami Fraksi Gerindra menolak pasal per pasal, Pasal 1 sampai Pasal 45 beserta lampirannya. Demikian dari saya, terima kasih Pimpinan yang saya hormati, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| Dr. H. M. FARID ALFAUZI A-555/F-P HANURA/DAPIL: JATIM XI | <p>Terima kasih Pimpinan, Sidang yang mulia yang saya hormati, Menyoroti PMN, saya Wakil Ketua Komisi VI, saya sangat menyayangkan konsistensi dari sikap beberapa fraksi dalam Sidang ini ingin saya sampaikan dalam Komisi VI ini BUMN, PMN yang kita bicarakan sebesar 34 triliun, untuk PMN yang non cash sebesar 2,6 triliun tidak ada satupun fraksi yang menolak, semua menerima. Untuk PMN cash sebesar 31 triliun, PMN sebesar 28 triliun dari 31 triliun yang 28 triliun ini tidak satupun fraksi menolak PMN itu, tidak ada satupun fraksi, termasuk fraksi yang menolak APBN-pun menerima secara utuh, 28 triliun pembicaraan terhadap BUMN, hanya 2 triliun yang menjadi pembicaraan kita, yang itupun disetujui dengan</p> | |

| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|---|---|---|
| | <p>penolakkan 2 (dua) fraksi, ada yang 1 (satu) fraksi, ada yang hanya memberikan catatan, ini yang terjadi dan Komisi VI saya sebagai Pimpinan telah memberikan waktu kepada kapoksi-kapoksi di Komisi VI untuk konsultasi dengan fraksi masing-masing dan keputusan ini beberapa kali kami tunda karena beberapa fraksi menyatakan belum konsultasi dengan fraksinya. Satu kapoksi pun belum konsultasi dengan fraksinya, kita tunda sampai sehari dan ketika semua sudah selesai konsultasi diputuskan PMN di Komisi VI itu dan hasilnya sebanyak 32 triliun, dari 34 triliun itu disetujui secara utuh oleh seluruh fraksi. Ini juga didasari oleh keinginan Komisi VI memiliki BUMN yang tangguh di Indonesia, misalkan ini PMN untuk PLN, bukan untuk siapa ini? untuk rakyat kecil, juga untuk tumbuhnya industry nasional kita dengan persediaan energi yang cukup. Pemberian PMN kepada Bulog misalnya, untuk apa? untuk memperkuat infrastruktur pangan sesuai dengan nawa cita yang telah digagas oleh Pak Jokowi. Aneh juga kalau PDI Perjuangan menolak ini, sementara di komisi PDI Perjuangan dengan gagahnya memperjuangkan ini. Saudara Sidang yang terhormat, inilah sebenarnya pikiran Komisi VI yang berkembang kalau kemudian di Sidang ini fraksi-fraksi yang dengan gagahnya memperjuangkan PMN di Komisi VI disini menolak. Saya bertanya, ada apa dengan ini? bagaimana nasionalismenya?, bagaimana konsistensinya itu mungkin dan kalau ini dilanjutkan barangkali akan sangat panjang Ketua?. Kalau kemudian beberapa fraksi tadi sudah menerima RUU APBN ini diputuskan saja, dengan catatan-catatan yang ada tadi itu dan saya ingatkan juga kepada Pimpinan, bagaimana Sidang ini bisa ada fraksi balkon diatas itu.? Silakan ditertibkan dulu, sebelum mengambil keputusan, terima kasih Pimpinan.</p> | |
| Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A A-350/F-P GERINDRA/DAPIL: JABAR VIII | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb. Terima kasih Pimpinan, Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi saat ini, dalam situasi krisis ekonomi dibidang energi, dibidang BBM, rakyat dipaksa untuk mensubsidi pertamina. Saya katakan demikian, karena harga BBM misalnya premium dan yang solar, khususnya premium ditetapkan harganya sekitar 7 bulan yang lalu dengan asumsi pada waktu itu perhitungannya harga minyak mentah 60 U\$D, kurs rupiah terhadap dollar Rp.12.500. Mulai akhir Juni, harga minyak turun, mencapai titik terendahnya kurang dari 40 U\$D. Hari ini harga minyak adalah 45 U\$D per barel, sejak saat itu kami khususnya Fraksi Gerindra meminta Pemerintah untuk menurunkan harga BBM, karena biaya pengadaannya sudah turun, walaupun dijelaskan oleh Pemerintah bahwa terjadi pelemahan rupiah terhadap dollar tapi kalau hitung pelemahannya</p> | KETUA RAPAT: Wala'ikumsalam Wr.Wb, baik terima kasih Pak Kardaya. |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| | <p>hanya 9%, sementara harga minyak turunnya hampir sekitar 30%, jadi netnya itu masih banyak turunnya harga minyak dibanding pelemahan begitu; Yang kedua : dasarnya adalah diseluruh dunia, dinegara-negara lain rakyatnya sedang menikmati harga BBM yang rendah karena harga minyak yang rendah. Hari ini Malaysia dengan tanpa subsidi harga bensin RON 95 Rp.6.400, jadi kalau harga untuk RON seperti di kita RON 88 tentunya akan jauh lebih murah dari situ. Kita mintakan Pemerintah untuk menurunkan harga BBM dengan maksud untuk mengurangi beban rakyat khususnya rakyat yang kecil ini demi untuk mengurangi beban karena adanya krisis ekonomi, tetapi dijawab oleh Pemerintah waktu itu, permintaan itu tidak bisa karena harus mengganti atau menutupi kerugian pertamina, kalau harus menutupi kerugian pertamina artinya rakyat hari ini mensubsidi pertamina, karena semestinya rakyat menikmati harga BBM yang lebih murah dari yang sekarang. Dimana aturannya bahwa subsidi itu dibebankan kepada rakyat. Sejak kapan dinegara ini subsidi itu dibebankan kepada rakyat?, dinegara mana yang subsidi itu dibebankan kepada rakyat. Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan itu mendasari juga kebijakan-kebijakan yang ada di RAPBN 2016, dengan tidak transparannya Pemerintah kepada rakyatnya sendiri dalam hal khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kami sangat-sangat condong, sangat-sangat setuju dan kami bersikap bahwa <u>lebih baik RAPBN-nya tidak disetujui karena Pemerintah tidak transparan kepada rakyatnya sendiri</u>, Pemerintah tidak memikirkan <u>kepada rakyatnya sendiri</u>. Rakyat disuruh mensubsidi pertamina, sejak kapan itu? kita mintanya sejak kapan itu? maka tolong dipikirkan bahwa ini sesuatu yang serus karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, terima kasih Wabillahittaufiq walhidayah Wr.Wb.</p> | |
| ARIA BIMA A-176/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATENG V | <p>Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Yang saya hormati Saudara Pimpinan, Yang saya hormati kawan-kawan Anggota Dewan dan Pemerintah, Proses dari pada pembahasan APBN 2015-2016 sejak dari pagu indikatif ke pagu definitif dari proses komisi sampai dengan Banggar, sampai dengan Paripurna kembali ke Paripurna hari ini menunjukkan suatu dinamika yang terlihat bagaimana komitmen kita terhadap politik anggaran kita untuk lebih teralokasi didalam belanja anggaran tahun 2015-2016 ini untuk lebih berorientasi pada politik kesejahteraan yang kita sepakati dan kita komitmen secara bersama-sama. Bahwa ada cara pandang masing-masing fraksi asektuasi daripada politik anggaran dari dimensi cara</p> | KETUA RAPAT : Wa'alaiksalam Wr.Wb. |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|------|---|-----------------|
| | <p>pandang fraksi itu hal yang kita anggap sesuatu dinamika yang tidak perlu kita saling menegasikan. Argumentasi-argumentasi inilah yang sebenarnya mengalir dari pembahasan komisi sampai panitia anggaran ke Paripurna, kalau ada sesuatu yang pernah diputuskan kemudian ada hal yang diluruskan, bukan sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang tidak konsis didalam suatu proses politik di DPR. Salah satu contoh tadi disinggung oleh Pimpinan Komisi VI yang melihat penyertaan modal negara yang awalnya dari Poksi PDI Perjuangan terlibat didalam proses pembahasan di Komisi VI, saya tidak perlu harus membuka secara keseluruhan bahwa proses pengambilan keputusan penyertaan modal negara di Komisi VI-pun bukan hal yang sekedar kita menyetujui, tetapi ada dasar-dasar apa Pemerintah itu memberikan alokasi penyertaan modal negara tujuannya apa?, dampaknya apa? itu selalu kita kritisi secara global dalam artian secara garis besar politik anggaran, maupun dari aspek pandang dari masing-masing korporasi dan garis besar Kementerian BUMN yang terkait dengan nawacita maupun garis besar program kementerian yang ada. Bahkan dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VI selalu menekankan sejauh mana penyertaan modal negara ini linkid dengan kementerian-kementerian teknis. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa poksi PDI Perjuangan, benar pernah menyetujui hal-hal yang menyangkut bukan keseluruhan dari BUMN penerima PMN, aksentuasi, prioritas waktu itu lebih daripada pangan dan infrastruktur perhubungan yang kita anggap memang ini perlu untuk hal-hal yang pondasi untuk pembangunan kita kedepan. Bawa kemudian di Banggar besar dilihat bahwa keterbatasan penerimaan negara dan alokasi APBN perlu adanya suatu penekanan-penekanan program yang selayaknya mungkin dari cara pandang PDI Perjuangan lebih bisa dimanfaatkan oleh kementerian teknis untuk hal-hal yang menyangkut program-program kerakyatan berupa program-program padat karya, itu adalah suatu yang dinamika, itu adalah sesuatu hal yang mengalir secara prioritas sejauh mana <i>cost ratio</i> yang kita berikan kepada masing-masing kementerian itu berdampak pada hal-hal yang urgent yang penting. Tidak benar bahwa tidak ada catatan apapun didalam pemberian penyertaan modal negara didalam keputusan Komisi VI dan itu termemori, terdokumenter, masing-masing fraksi dari 22 BUMN, berapa yang disetujui masing-masing fraksi itu ada tabulasinya. Tidak kemudian sepakat mutlak menerima penyertaan modal negara itu tidak. Fraksi PDI Perjuangan kurang lebih hanya 12 BUMN yang kita setujui untuk penyertaan modal negara dengan hal yang menyangkut pangan dan infrastruktur perhubungan. Pimpinan dan kawan-kawan sekalian, pandangan-pandangan semacam ini dari Fraksi PDI Perjuangan melihat dari</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|--|
| | <p>suatu hal yang sah dari masing-masing fraksi untuk berbeda pendapat tetapi kita tidak akan berbeda pendangan selaku Anggota Dewan bahwa politik anggaran kita sebenarnya lebih kita inginkan hal-hal yang menyangkut bagaimana mempercepat fungsi kita sebagai Anggota Dewan dalam anggaran masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Maka untuk itu, Pimpinan bahwa banyak hal yang sudah dibicarakan di komisi, banyak hal yang sudah dibicarakan di panitia anggaran dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran. Saya mengusulkan supaya tidak terlalu banyak hal menjadi perdebatan yang saling mendegaskan bahkan ada kecenderungan mulai saling tidak menghormati pendapat fraksi satu dengan yang lainnya, maka bagi fraksi yang memang kali ini belum bisa menyepakati secara keseluruhan maupun beberapa catatan-catatan itu kita hargai sebagai suatu catatan, masukan yang harus diperhatikan oleh kita sendiri didalam melakukan fungsi pengawasan maupun oleh Pemerintah sebagai eksekutif didalam melaksanakan mengimplementasikan anggaran tersebut. maka untuk itu Pimpinan, saya mengusulkan karena pembicaraan cenderung kemudian mengarah perdebatan yang sebenarnya itu sudah terjadi diproses baik di komisi maupun badan anggaran, kami mohon untuk segera Paripurna ini, <u>segera mengambil keputusan untuk menyetujui RAPBN Tahun 2015-2016 dengan tetap memperhatikan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh masing-masing komisi maupun masing-masing fraksi.</u> Demikian terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| H. EPYARDI ASDA, M.Mar A-509/F-PPP/DAPIL: SUMBAR I | <p>Saya melihat sudah banyak yang berbicara, kalau bisa digilir per-fraksi saja Pak Ketua, biar semuanya tahu.</p> | KETUA RAPAT : Maksud saya setelah tidak ada sampaikan lagi orang per orang, nanti langsung saatnya kita akan pendapat per fraksi. |
| BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A A-277/F-PG/DAPIL: JATENG VII | <p>Fraksi Partai Golkar mendukung saran dari pada PDI P dan PPP untuk segera diambil keputusan. Kita minta kepada Pimpinan, jangan lagi membuang-buang waktu, apa lagi menggoreng-gorengkan begitu, lanjut Ketua terima kasih.</p> | |
| RAMSON SIAGIAN A-362/F-P GERINDRA/DAPIL: JATENG X | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, Saya perlu mengklarifikasi tadi ada Anggota Dewan yang terhormat menyatakan mengenai proses penentuan PMN di komisi, dari komisi dalam proses pembahasan anggaran tentunya pengambilan keputusan masuk ke Badan Anggaran, jadi apapun yang ada di komisi, bisa berubah di Badan Anggaran. Dari Badan Anggaran masuk ke</p> | KETUA RAPAT : Saya beri kesempatan ke masing-masing fraksi, tentunya kita masih juga memberi kesempatan kepada setiap Anggota, tetapi saya mohon secara singkat agar segera kita mengambil keputusan, kemudian |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|-------------|---|---|
| | <p>Paripurna sekarang adalah tingkat tertinggi dalam pengambilan keputusan tetapi ada yang perlu saya sampaikan sebagai <i>point information</i> sekaligus <i>point of clarification</i>, bahwa didalam RAPBN ini dinyatakan defisit 2,15% atau 273,1 triliun rupiah, tetapi ada hal yang tersimpan disini, yang tersembunyi bahwa PMN yang nilainya sangat besar ini tidak masuk didalam struktur belanja negara, masuk didalam pembiayaan yang ini dibiayai dengan utang, defisit anggaran belanja 272 triliun itu dibiayai dengan utang, 267 triliun ditambah dengan pinjaman luar negeri 75 triliun, kita membuat utang 402 triliun, disini bahwa PMN itu bukan hanya untuk BUMN-BUMN, selain BUMN seperti yang dikemukakan disini yang sangat besar seperti tadi yang dikemukakan oleh Ketua Banggar juga untuk Organisasi Lembaga Keuangan International dan pembiayaan eksport Indonesia dan juga untuk dana-dana pengelolaan pembiayaan perumahan, dll. Ada juga disini dana bergulir 9 triliun, total Pemerintah harus membuat utang untuk APBN ini 327,2 triliun yang ada dihalaman terakhir, bisa dilihat dilampiran satu, tambah pinjaman luar negeri, bisa dilihat di halaman terakhir 75 triliun, total 402 triliun. Kalau ini masuk didalam anggaran belanja, ini defisit sudah diatas 3%, ini sudah melanggar undang-undang, saya siap berdebat dengan menteri keuangan soal ini. Diberikan waktu saya berdebat bahwa ini PMN harus masuk didalam anggaran belanja, kalau dia masuk didalam struktur belanja, selisih antara belanja dengan pendapatan akan diatas 3%. Ini melanggar undang-undang, ini yang tidak transparan dalam proses pembuatan APBN ini. Ini argumentasi yang kuat, bahwa kita harus kembali kepada undang-undang, ini adalah data-data yang ada disini sekarang, boleh dibaca di halaman no.2 terakhir, bahwa ini membuat hutang 327 triliun dari Surat Hutang Negara, baru membuat pinjaman luar negeri 75 triliun, itu total sudah 402 triliun, seharusnya PMN jangan di pos pembiayaan, yang diluar struktur belanja itu harus masuk ke belanja, sehingga total belanja bukan seperti tadi yang disampaikan dua ribu sekian triliun tetapi sudah tambah 400 triliun, itu sehingga mengakibatkan defisit diatas 3%, untuk itu Pak Pimpinan, perlu Sidang ini di skors, supaya kita ada klarifikasi, supaya jangan melanggar undang-undang yang nanti jika diajukan <i>judicial review</i> ke MK nanti UU APBN ini akan dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945 dalam proses pembuatan Undang-Undangnya. Dan ini adalah data-data yang akurat, sementara itu yang sampaikan Pimpinan, bahwa Fraksi Partai Gerindra mengajukan penolakan RAPBN adalah agar kembali pada rule yang benar dan kita punya alternatif untuk membuat agar strukturnya tepat, tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Demikian Pak Ketua, terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | <p>kita akan melanjutkan kepada agenda yang berikutnya.</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|---|
| Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A A-381/F-P GERINDRA/DAPIL: NTT II | <p>Pimpinan Rapat yang kami hormati, Para Anggota DPR yang kami hormati, Sebelum pernyataan persetujuan atau penolakan fraksi, saya kira mari kita kembali membaca Tatib yang kita susun bersama-sama. Dalam Tatib DPR Pasal 158, saya bacakan pengambilan keputusan RUU tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan acara yang kita lakukan kemarin malam sampai dengan jam setengah empat pagi, satu pengantar Ketua Badan Anggaran sudah dilakukan pada saat ini, dua laporan panitia kerja sudah dilaksanakan; pembacaan naskah RUU tentang APBN juga sudah dilakukan, kemudian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, juga sudah disampaikan, berikutnya pendapat Pemerintah sudah dilaksanakan, yang berikutnya penandatanganan naskah RUU tentang APBN juga sudah ditandatangani namun masih ada fraksi yang belum menandatangani, termasuk Fraksi Partai Gerindra dan kemudian pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran pada saat penyampaian awal tadi dan kita tahu bahwa pandangan-pandangan mini fraksi menggambarkan masih ada fraksi-fraksi termasuk Fraksi Golkar yang menyatakan bahwa apabila Pemerintah menyepakati, catatan-catatan dari apa yang disampaikan barulah disetujui dan kemudian PKS juga menyatakan 18 catatan dan baru kemudian pengambilan keputusan. Gerindra juga-pun memberikan penolakan karena disebabkan beberapa point yang kita minta klarifikasi kepada Pemerintah dan untuk itu maka point nomor 5 hari ini juga harus kita lalui, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tadi saya bacakan, dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi dan hasil Pembicaraan Tingkat I sudah kita Dengarkan; dan b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPR; dan c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili, proses ini yang harus kita lalui. <p>Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pimpinan Banggar, masih ada fraksi yang menginginkan penjelasan dari pada Pemerintah berkaitan dengan catatan-catatannya dan untuk itu sebelum kita mengambil keputusan, sebagaimana dengan Tatib ini, kami Fraksi Partai Gerindra meminta untuk di skors untuk kita mendalami kembali berbagai hal-hal yang berkaitan dengan catatan-catatan tersebut.</p> | <p>KETUA RAPAT : Baik terima kasih Pak Fary, cukup ya? Oke. Tentunya semua pandangan, masukan dalam kapasitas Bapak-Ibu sekalian sebagai Anggota kita sudah catat dan kita putuskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Beberapa pandangan dan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Banggar sudah terangkum juga dalam kaitan hasil notulensi Paripurna yang akan kita putuskan nanti. Bapak-Ibu sekalian dari 9 fraksi yang sudah menyetujui dan 1 fraksi yang sudah ataupun masih menolak, ini tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, tentunya juga sekarang kita dalam kapasitas untuk ingin mendengarkan sikap fraksi yang terakhir, sebelum kita mengambil keputusan. Apakah dapat disetujui? Ketok palu. Baik terima kasih atas persetujuannya Bapak-Ibu sekalian. Sekarang berurutan saja, kami minta pendapat terakhir dari fraksi PDI Perjuangan.</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|--|
| | Ini berkaitan dengan Tatib yang harus kita ambil. Saya kira itu yang kami inginkan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman Anggota DPR yang kami hormati, karena kita melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan Tatib yang kita sepakati bersama. Terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb. | |
| Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A A-381/F-P GERINDRA/DAPIL: NTT II | Pak Pimpinan, Saya kira tadi permintaan kami jelas, untuk kita skors lebih dulu untuk pengambilan keputusan. | KETUA RAPAT: Nanti pada saat pandangan fraksi bisa menyampaikan lagi, Pak Fary. Sama, nanti minta skors, juga akan skors |
| RISA MARiska, S.H. A-159/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JABAR VI | Terima kasih Pimpinan, Terkait dengan laporan Banggar tentang pembicaraan terakhir APBN Tahun 2016, kami berpandangan bahwa kami pada prinsipnya menyetujui untuk selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini , terima kasih | |
| BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A A-277/F-PG/DAPIL: JATENG VII | Terima kasih Pimpinan. Fraksi Partai Golkar tetap konsisten pada apa yang disampaikan tadi malam dalam pandangan mini fraksi, Fraksi Partai Golkar menerima dengan beberapa catatan , terima kasih. | KETUA RAPAT: Baik terima kasih Pak Bambang. |
| Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A A-381/F-P GERINDRA/DAPIL: NTT II | Tadi saya sudah kami sampaikan Pimpinan, saya kira berkaitan dengan tahapan dalam Tatib kita membutuhkan penjelasan, ini bukan persoalan cepat atau lembat tetapi harus mengikuti aturan main dan Tatib yang dirangkum Pasal 158 <u>bahwa kami didalam penetapan tahap akhir masih membutuhkan penjelasan dari Pemerintah, untuk itu kita minta untuk di skors.</u> | KETUA RAPAT: Baik terima kasih dari Fraksi Partai Gerindra. Jadi memohonkan ada penjelasan dan skors dalam kaitan pembahasan sebelum pengambilan keputusan. |
| PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | Terima kasih Pimpinan, <u>Prinsipnya Fraksi Partai Demokrat menerima dan juga sepanjang dari RAPBN 2016 untuk membahas menjadi Undang-Undang Pimpinan.</u> | |
| PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL | Terima kasih Pimpinan, Pada dasarnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional sebagaimana disampaikan tadi malam pada Pandangan Mini Fraksi, pada kesempatan ini tetap seperti apa yang disampaikan pada Pandangan Mini Fraksi tidak berubah Pak Ketua, yaitu <u>menyetujui untuk dilanjutkan pada pengambilan keputusan selanjutnya.</u> | |
| H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A A-75/F-PKB/DAPIL JATIM X | Terima kasih Pimpinan dan Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati, | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|-----------------|
| PENDAPAT F-PKB | <p>Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi semua proses dalam pembahasan RAPBN 2016 ini sampai tadi laporan dari Ketua Banggar dan sejatinya setelah proses pengambilan keputusan semalam pada Pembicaraan Tingkat I maka hari ini pada Pembicaraan Tingkat II tentunya tidak lagi kita mengulur-ulur waktu Pimpinan untuk meluruskan pembahasan ini dan memutuskannya. Kami menghormati keberatan dan catatan-catatan semua fraksi yang ada termasuk sahabat kami dari Fraksi Partai Gerindra tentu dalam pengambilan keputusan pada siang hari ini, karena ini sudah pada sikap masing-masing fraksi dan Pemerintah semalam juga sudah memberikan penjelasan kepada semua fraksi yang hadir tentunya kami dari <u>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan menghormati semua dari catatan-catatan termasuk catatan kami dan catatan dari fraksi-fraksi yang lain untuk segera diambil keputusan Pimpinan dalam Pembicaraan Tingkat II Paripurna hari ini Pimpinan.</u></p> | |
| H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M A-122/F-PKS/DAPIL: SULSEL II PENDAPAT F-PKS | <p>Bissmillahirrohmanirohim, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Fraksi PKS menghormati dinamika dalam Rapat Paripurna ini, tetapi untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat yang kita cintai, <u>sikap Fraksi PKS menerima RUU APBN untuk disahkan, tapi catatan-catatan kritis dari Fraksi PKS, mohon ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah tidak dianggap seperti angin lalu.</u> Demikian, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| Dra. Hj. ELVIANA, M.Si A-511/F-PPP/DAPIL: JAMBI PENDAPAT F-PPP | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb., Pimpinan dan Bapak-Ibu DPR yang saya hormati, Fraksi PPP seperti yang semalam juga sudah kami sampaikan dalam Rapat Banggar, <u>Fraksi PPP dapat menerima pengesahan APBN 2016 pada sore hari ini, dengan catatan Fraksi PPP menolak penanaman modal kepada BUMN karena rawan untuk diselewengkan.</u> Kami memberi catatan kepada PMN yang akan menyelenggarakan atau mengerjakan proyek kereta api cepat antara Jakarta dan Bandung, sekiranya BUMN tersebut gagal menyelenggarakan proyek ini, maka bisa diakuisisi dan BUMN ini akan dibeli oleh pihak asing dalam hal ini Cina. Oleh sebab itu demi harga diri bangsa kami menolak penanam modal negara kepada BUMN, itu catatan dari PPP. Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| AHMAD H.M. ALI, S.E A-32/F-P NasDem/DAPIL: SULTENG PENDAPAT F-PARTAI NasDem | <p>Terima kasih Pimpinan, Mencermati dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan APBN mulai dari awal sampai dengan hari ini begitu banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi,</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|------------------------|
| | baik itu dari NasDem sendiri maupun dari fraksi-fraksi lain. Untuk itu Fraksi Partai NasDem sangat menghargai, sangat mengapresiasi catatan-catatan yang telah diberikan oleh fraksi-fraksi tersebut, namun menyadari bahwa hari ini, saat ini begitu banyak ada 220 juta masyarakat Indonesia menunggu keputusan DPR. Untuk itu Fraksi Partai NasDem konsisten seperti apa yang telah disampaikan dalam Rapat Banggar tadi subuh, <u>menyatakan bahwa menyetujui dan meminta pada hari ini agar Paripurna ini segera mengesahkan RAPBN 2016 menjadi Undang-Undang</u> , terima kasih. | |
| H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si A-551/F-P HANURA/DAPIL: JABAR II PENDAPAT F-PARTAI HANURA | Assalamu'alaikum Wr.Wb. Perdebatan tentang APBN ini pro rakyat atau tidak pro rakyat itu sudah panjang kita bicarakan. Apakah APBN ini realistik atau tidak realistik itu sudah panjang kita lakukan? Apakah pembiayaan BUMN itu harus kita lakukan melalui PMN atau revaluasi itu sudah panjang kita lakukan? Dan kita nampaknya harus melakukan pendalaman karena pendalaman juga sudah sering kita lakukan, oleh karena itu Fraksi Partai Hanura sebagaimana tadi malam sudah kita jelaskan panjang lebar, maka dengan ini kami <u>menerima RUU APBN untuk dijadikan Undang-Undang APBN</u> . Tentunya Pemerintah harus memperhatikan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh para fraksi sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang APBN ini. Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. | |

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih dari Fraksi Partai Hanura,
 Bapak-Ibu sekalian Sidang Paripurna yang saya hormati,
 Tentunya sudah 10 (sepuluh) fraksi menyampaikan posisi maupun sikap yang terakhir sebelum kita melakukan proses pengambilan keputusan. Bapak-Ibu sekalian dari beberapa rangkaian bobot pendapat dari 10 (sepuluh) fraksi, tentunya kita sebagai institusi DPR menggunakan aspek kehati-hatian, oleh karena itu masih ada beberapa fraksi yang tentunya kita harus memperjelas beberapa catatan-catatan yang menjadi pegangan kita dalam Paripurna ini, sebagaimana *mengabsorb* daripada salah satu fraksi dari Partai Gerindra maupun dari PPP. Temen-teman semua yang sudah termaktub dan terangkum didalam pandangan didalam rapat kerja Banggar. Oleh karena itu dari meja Pimpinan, kami mengusulkan untuk kita membuat redaksional keputusan maupun kesimpulan yang betul-betul mengakomodir dari seluruh sikap fraksi-fraksi dan tentunya membutuhkan suatu penjelasan terakhir dalam kaitan sebelum kita tentunya, kami paham seluruh fraksi menginginkan adanya sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ini sudah dinanti oleh rakyat, tetapi kita harus betul-betul menganut asas kemudian kehati-hatian dalam kaitan catatan-catatan yang harus diperjelas, apakah itu PMN?, apakah itu program prioritas Pemerintah ataupun yang lain, sehingga kami mengusulkan dari meja Pimpinan untuk skors barang sejenak untuk lobby, merumuskan redaksional yang akan kita simpulkan, walaupun sebetulnya kita sudah paham dan sudah tahu keputusan apa yang akan kita putuskan. Apakah dapat disetujui? Ketok palu!
 Baik terima kasih skor sampai jam 6, oke jam 7, ketok palu.

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|--|
| KETUA RAPAT : (membacakan hasil lobby) Assalamu'alaikum Wr.Wb. | <p>Tentunya setelah dibahas dan mendengarkan dari sikap posisi terakhir dari masing-masing fraksi dan setelah mempertimbangkan dan mendengarkan dari hasil pandangan maupun hasil rapat kerja dari Banggar yang telah disampaikan oleh Saudara Ahmadi Noor Supit, tentunya tadi kita sepakati bahwa kita akan melalui tahapan skors dan melakukan lobby dari seluruh Pimpinan Fraksi. Jadi sedianya memang rapat kita mulai lagi jam 19.00 WIB, tetapi karena tentunya kita sepakati bahwa ini perlu komunikasi dari seluruh pihak-pihak yang terkait, Pimpinan-pimpinan Partai Politik dan seluruh seluruh stakeholder yang barangkali karena asas urgent kita tentunya tetap harus mengedepankan aspek akomodatif dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu ijinkanlah kami dari meja Pimpinan, menyampaikan draft kesimpulan dari hasil lobby Pimpinan dengan seluruh Pimpinan Fraksi yang hadir dan tentunya juga dengan Pimpinan Banggar serta sudah dikonsultasikan dengan pihak Pemerintah tentunya, maka draft kesimpulan tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPR RI dapat menyetujui RUU tentang APBN TA 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang APBN TA 2016 dengan catatan bahwa seluruh catatan-catatan fraksi-fraksi merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari UU tentang APBN TA 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Jadi sekali lagi ini adalah hasil draft kita; 2. Mengenai penyetaraan modal negara dikembalikan lagi kepada komisi-komisi terkait yang akan dibahas didalam APBN P Tahun 2016 yang akan datang. <p>Jadi 2 (dua) draft ini sudah melalui tahapan, insya'allah sudah dalam satu visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara kita, oleh karena itu kami mohon persetujuan dari seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati. Apakah draft kesimpulan hasil lobby ini dapat kita setujui sebagai kesimpulan kaitan pengesahan APBN 2016, Setuju, ketok palu, setuju.</p> <p>Dengan demikian sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya kami mohon persetujuan lagi tadi atas nama Anggota DPR, secara institusi DPR apakah ini dapat disetujui sebagai kesimpulan? Ketok palu. Setuju.</p> <p>Baik terima kasih atas persetujuan yang kedua. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, kita beri kesempatan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang tentunya kami sekali lagi atas Pimpinan Dewan dan Pimpinan Banggar.</p> | |
| Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A A-381/F-P GERINDRA/DAPIL: NTT II | Beri kesempatan kepada Fraksi Gerindra untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan 2 (dua) kesimpulan yang sudah disetujui tadi, kami persilakan Ketua Fraksi Pak Muzani untuk menyampaikan | |
| H. AHMAD MUZANI A-338/F-P GERINDRA/DAPIL: LAMPUNG I KETUA FRAKSI F-P GERINDRA | <p>Terima kasih kepada Sudara Pimpinan, Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah yang saya hormati, Pimpinan Sidang, Anggota DPR yang kami muliakan,</p> <p>Hari ini kita menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi APBN karena APBN adalah instrument yang sangat penting bagi eksistensi berlangsungnya pembangunan di Republik Indonesia. Fraksi Partai Gerindra kemarin menyatakan menolak APBN yang diajukan oleh Pemerintah karena dalam rancangan yang kita pelajari yang diajukan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam pandangan Gerindra lebih berpihak kepada upaya memperbesar bagi kesehatan BUMN, namun kurang dan tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Namun demikian Pemerintah sekarang mengubah pandangan dan kebijakannya dengan</p> | KETUA RAPAT: <p>Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi Gerindra Pak Ahmad Muzani yang telah menyampaikan pandangan terkait dengan apa yang telah kita setujui bersama dalam APBN 2016. Untuk selanjutkan kami persilakan dari pihak Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Keuangan untuk menanggapi dan membacakan sikap resmi terakhir</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|--|
| | <p>meng-hold atau mendrop kebijakan untuk PMN dan mengembalikan dana tersebut bagi kepentingan rakyat yang berkaitan dengan infrastruktur bencana asap, pengangguran, desa dan bantuan langsung kepada masyarakat. Kepada janji Pemerintah itu Fraksi Gerindra mencatat dengan baik dan kami akan terus mengingatkan kepada Pemerintah sebagai sebuah komitmen yang tidak terpisahkan kepada DPR RI. Fraksi Gerindra dengan ini menyatakan setuju atas APBN itu, karena kami percaya bahwa komitmen Pemerintah akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami akan terus mengontrol Pemerintah, kami akan terus mengikuti perkembangan, demi perkembangan dan kami menginginkan agar setiap sen uang negara yang dikeluarkan betul-betul dimaksudkan untuk kepentingan rakyat dan kebaikan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami juga ingin menjadi catatan Pemerintah hutang yang semakin membengkak agar terus diperhatikan dan pengangguran yang semakin meninggi serta kemiskinan yang terus bertambah, harus betul-betul menjadi konsen Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2016 ini. Terima kasih kepada Pemerintah yang telah mengakomodir pandangan DPR, Fraksi Gerindra dan pandangan-pandangan rakyat yang berkembang kita akan terus mengontrol kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN ini. Terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | dari Pemerintah, waktu dan tempat kami persilakan. |
| AKBAR FAIZAL A-33/F-P NASDEM/DAPIL: SULSEL II | <p>Terima kasih Pimpinan, Terlepas soal respek kita kepada saudara-saudara kita yang Alhamdulillah hari ini sudah mulai bernafas dengan baik, dikawasan Sumatera dan Kalimantan bisa dilihat mulai turun hujan di Kota Pekanbaru, saya mau bertanya sebenarnya Pimpinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa istimewakah Saudara Viva Yoga Mauladi untuk mengusulkan kepada kita tentang usulan pensus ini? 2. Apakah mekanisme yang seharusnya itu sudah kita pakai, karena sampai sekarang setidaknya saya sebagai Anggota DPR belum pernah menerima usulan tentang ini? maka untuk itu Pimpinan, saya tidak tahu apakah saya yang keliru atau saudara saya, sahabat saya Viva Yoga Mauladi yang demikian maju selangkah dibanding saya untuk mengusulkan ini dan kemudian mendapatkan keistimewaan di ruang Paripurna ini, terima kasih Pimpinan. | KETUA RAPAT : Baik terima kasih Saudara Akbar Faizal tentunya kita akan berpinjuk pada hasil Bamus, kita nanti akan menjadi lebih jelas pada saat menyampaian. |
| H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE A-29/F-P NASDEM/DAPIL: KALBAR | Saya cuma hanya mengingatkan pada saat Rapat Bamus kemarin, bahwa perlu penyamaan persepsi, kemarin kita sudah sepakat bahwa kita tidak menggunakan pensus interpelasi maupun angket, yang itu sudah disampaikan oleh Pak Fahri dan terakhir kita terima. Didalam Tatib itu sudah jelas, di Pasal 186 itu adalah hak | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|-----------------|
| | <p>mengajukan pertanyaan, yang saya saksikan dan kita setujui pada saat itu hanya menyampaikan hak untuk bertanya. Jadi kalau sekarang ada pansus interpelasi itu menyalahi dan beda antara interpelasi dengan hak untuk bertanya, itu sudah jelas diatur hak interpelasi itu di dalam MD3 Pasal 195, sedang hak untuk bertanya itu diatur didalam Pasal 186, ini harus kita dudukan dulu posisinya jangan sampai, karena kita sesuai dengan keputusan Bamus kemarin kita hanya menyatakan untuk hak bertanya saja. Terima kasih.</p> | |
| ONO SURONO A-163/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JABAR VIII | <p>Terima kasih,</p> <p>Yang pertama : saya perlu juga menyampaikan bahwa saya di Komisi IV dan saya mengikuti betul bagaimana kronologis, sehingga pada hari ini ada usulan terkait dengan interpelasi. Pada Rapat Pimpinan Komisi IV dengan ketua-ketua poksi, disana disampaikan, disepakati bahwa akan dibentuk pansus, tanpa bicara terkait dengan interpelasi ataupun angket. Kemarin melalui undangan kesekjenan ada 2 (dua) sms yang saya terima, yang pertama terkait dengan angket, lalu ada revisi sejam kemudian interpelasi, sehingga tentunya inipun menjadi pertanyaan bagi saya, agenda apakah sebenarnya yang sedang kita hadapi, apabila kita cermati betul terkait dengan penanganan kabut asap ini, kenyataan Pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya, termasuk Komisi IV telah melakukan Raker dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disana sudah dijabarkan berbagai macam hal, kalau berbicara terkait dengan konsistensi Pemerintah untuk menangani ini, kita semua tahu bahwa per 22 Oktober Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan penanganan kabut asap, bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan tugas, tetapi hampir seluruh kementerian diberikan tugas oleh Presiden;</p> <p>Yang kedua : kalau bicara terkait dengan hal ini, ujungnya adalah penegakkan hukum, kemarin kita juga sudah mendapatkan penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disemua provinsi yang mengalami kebakaran, sekarang sudah ada tersangka baik perorangan maupun korporasi. Kalau ujungnya adalah interpelasi ini berharap Pemerintah melakukan perubahan regulasi atau menyempurnakan regulasi, perlu saya sampaikan bahwa memang bahwa kebakaran hutan ini ada sebuah legalisasi, berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup, dimana pada Pasal 69 ayat (1) bahwa rakyat dilarang untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, tetapi di ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|-----------------|
| | <p>dan pada penjelasannya bahwa rakyat ini bisa membakar 2 (dua) hektar lahan per kepala keluarga, sehingga kalau ujungnya adanya regulasi yang harus kita benahi, saya disini juga berharap bahwa kita bisa mengusulkan bersama-sama kalau ini bersifat urgent, Pemerintah kita dorong untuk mengeluarkan PERPPU, untuk mencabut pasal tersebut, sehingga kedepan tidak ada lagi pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga Pimpinan, saya berharap bahwa apa yang substansi kita yang akan kita bicarakan melalui pengusul interpelasi sebenarnya sudah terjawab, kalau bicara terkait dengan dampak saya pikir ada mekanisme lain yang harus dilakukan, kalau dibidang kesehatan misalnya, Komisi IX bisa memanggil Menteri Kesehatan. Di bidang sosial, Komisi VIII bisa memanggil Menteri Sosial, di penegakkan hukumnya di Komisi III juga bisa melakukan Raker dengan Kepolisian yang melakukan penegakkan hukum. Sehingga saya pikir bahwa interpelasi ini tidak tepatlah kita lakukan, karena kenyataannya Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kabut asap tersebut. Sehingga ini Pimpinan, mohon di perhatikan oleh kita semua dan paling tidak kita memberikan apresiasi kepada masyarakat juga yang bersama-sama Pemerintah sudah melakukan penanganan terkait dengan kabut asap ini. Terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A A-335/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMSEL I | <p>Terima kasih Pimpinan atas kesempatannya, Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota DPR RI, Semangat tentang pansus ini, adalah semangat tentang kegelisahan DPR menyikapi keadaan akhir-akhir ini tentang bencana asap yang ada di 6 (enam) provinsi yang terparah di Indonesia. Ini sudah lama terjadi dan DPR menyikapi ini atas desakan dan keluhan dari masyarakat yang ada disekitar wilayah asap ini, 40 juta lebih masyarakat terdampak oleh asap, makanya inisiatif pengadaan pansus ini sebenarnya bukan dari satu fraksi saja, tetapi semua fraksi. Dalam mekanisme Tatib kita, dalam tata cara penyertaan hak dalam pengawasan pansus hanya kenal di angket, bukan interpelasi. Sebenarnya interpelasi ini adalah bagian yang menenangkan, menurunkan tensinya, kalau Gerindra sendiri inginnya pansus, cuma dalam pengawasan Tatib hanya mengenal di angket. Sekarang terserah, teman-teman Anggota DPR RI menyikapi ini, kita sebagai Anggota DPR semua ada 200 penandatangani pansus tergerak untuk menyelesaikan permasalahan, kita tahu Pemerintah juga sedang bekerja. Tetapi DPR dengan program ini, dengan pansus ini diharapkan bisa mendorong Pemerintah lebih cepat lagi, tidak hanya kabut asapnya, tapi selesai kabut asap ini akan adalagi masalah lainnya. Kementeri Kesehatan menyampaikan ada muncul penyakit baru diare,</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|---|
| | <p>karena musim hujan berkepanjangan nanti. Ini semua dampak dari kebakaran dan seterusnya. Selanjutnya yang paling penting di tahun depan, tahun 2016 tidak lagi terjadi yang namanya kebakaran hutan. Kita melihat kesungguhan Pemerintah, boleh dibilang ya, tapi dalam program kebijakan anggarannya tidak menunjukkan kesungguhan, barusan kita mengetok anggaran di kehutanan hanya 6,3 triliun saja. Kami berharap mengusul pansus ini, ada dengan pansus ini diharapkan mendorong Pemerintah, ini bukan upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintah menyerang kelompok tertentu, tapi ini membantu Pemerintah, DPR secara bersungguh-sungguh membantu masyarakat kita yang ada di daerah terdampak asap ini. 40 juta masyarakat yang lebih dari 3 bulan bernafas dirumah saja susah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi apakah kita akan menyimpulkan seperti apa kegiatan itu, kami dari Fraksi Gerindra secara terbuka, yang penting permasalahan ini selesai tahun 2016 tidak lagi terjadi kebakaran asap. Jadi ini Pimpinan, saya pikir lebih baik kita dengarkan dulu, usulannya seperti apa? baru kita cermati dengan baik, kalau masih belum solid dalam pengambilan keputusan, kita bisa skors dulu, kemudian kita rumuskan kesimpulannya seperti apa? yang semua bisa sama-sama menjalankannya. Sekali lagi tidak ada niatan untuk menyerang sekelompok mana? atau mendegradasi kewenangan Pemerintah, tapi ini peran kita sebagai DPR yang terugah atas 40 juta masyarakat Indonesia yang 3 bulan lebih terdampak asap, salah satunya di dapil saya Sumatera Selatan. Terima kasih Pimpinan.</p> | |
| H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M A-122/F-PKS/DAPIL: SULSEL II | <p>Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Pimpinan, saya kira yang pertama, kita harus memberi kesempatan kepada Pengusul, untuk menyampaikan alasannya gitu, karena didalam Peraturan MD3 semua Anggota DPR berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan menurut aturan didalam Pasal 194 bahwa sedikitnya 25 (dua puluh lima) orang sudah bisa mengajukan hak interpelasi itu. Jadi saya kira, apalagi sekarang sudah sampai 200 orang yang sudah bertandatangan, jadi saya mempertanyakan tadi kalau ada yang tidak setuju silakan saja, cuma berikan kesempatan juga yang setuju untuk menyampaikan, baru kita melihat apakah layak untuk diteruskan atau kita tidak diteruskan begitu?, itu yang pertama Pimpinan;</p> <p>Yang kedua : dari sisi manfaat dan dari sisi kegentingan atau maslahat bagi masyarakat, saya kira pansus kebakaran hutan dan lahan itu lebih penting daripada Pansus Pelindo yang saya kira tidak terlalu luas pencakupannya, kita menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan ini sudah terdampak 40 juta orang. Jadi kita</p> | <p>KETUA RAPAT : Sebelum ke Pak Jhon, ini mungkin kami hanya mau memberikan suatu alur lalu lintas, supaya lebih tertib. Mungkin kami mengusulkan karena kemarin sudah dibahas didalam Bamus seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif betul, memang seperti itu, lebih bijak kalau kita mendengarkan lebih dahulu. Apa yang menjadi harapan maupun yang menjadi hak dari pada debat yang harus sama-sama kita hormati. Kita belum tahapan pengambilan keputusan, mendengarkan dulu,</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|--|
| | <p>sebagai Anggota DPR, kita harus empati dan bukan untuk mejatuhkan atau menurunkan citra dari siapa-siapa. Ini semata-mata adalah bentuk hak pengawasan dan hak dan tanggungjawab sebagai Anggota DPR itu Pimpinan. Jadi saya kira kita beri kesempatan dulu Pimpinan kepada Pengusul untuk menyampaikan seperti apa alasan-alasannya dan kita harus menghilangkan semua prasangka atau pikiran-pikiran negatif, bahwa pansus atau apapun namanya ini akan menurunkan atau menyebabkan hal lain yang terganggu, itu yang kedua;</p> <p>Yang ketiga : Pimpinan bahwa kita melihat selama ini masalah kebakaran adalah masalah yang sudah klasik setiap tahun terjadi dan kita tidak melihat upaya yang sungguh-sungguh dan upaya yang maksimal dari Pemerintah, bagaimana supaya di tahun 2016 tidak akan terjadi lagi kebakaran. Dari sisi anggaran kita melihat terjadi pengurangan 160 miliar anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini berarti kita tidak ada keyakinan bahwa Pemerintah dan tidak ada jaminan bahwa 2016 tidak ada lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap yang bisa merugikan kita semuanya. Jadi saya kira begitu Pimpinan, dari Fraksi PKS sebagai Pengusul Inisiatif daripada hak untuk menggunakan interpelasi ataupun angket nantinya. Saya kira demikian Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | <p>sehingga sesuai dengan Bamus, bahwa agenda Rapat Paripurna ini sesuai dengan apa salah satu yang disampaikan oleh Pak Syarif kemarin, ini adalah mendengarkan terlebih dahulu dalam konteks pada Paripurna di tanggal 30 Oktober ini. kami persilakan pada para pengusul.</p> |
| JOHNNY G PLATE, S.E A-27/F-P NASDEM/DAPIL : NTT | <p>Terima kasih Pimpinan, Rekan-rekan yang terhormat,</p> <p>Kita baru saja mendengarkan penjelasan dari pengusul disebutkan secara spesifik, ini usulan interpelasi, kami mengutip Tatib. Tatib mengatur Pasal 166 mengatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pengusul kepada Pimpinan DPR; 2. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota Alpa belum dilakukan; 3. Bamus menjadwalkan Rapat Paripurna DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada Pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas alpa dan belum dilakukan dan karenanya usul interpelasi ini tidak layak untuk diteruskan, kita tutup rapatnya dan kembali untuk melakukan reses kita bertemu dengan masyarakat di dapil kita masing-masing, terima kasih Pimpinan. | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|-----------------|
| ARIF WIBOWO A-193/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATIM IV | <p>Baik terima kasih Pimpinan, Pimpinan yang saya hormati, Para Anggota Dewan yang ada di Paripurna yang saya hormati dan banggakan, Saya ingin menyampaikan dan sebagian adalah sebenarnya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Johny Plate dari Fraksi NasDem. Kami mengingatkan Pimpinan mestinya sejak awal Pimpinan menjelaskan tentang rencana pembentukan pansus ini dalam rangka untuk apa? dengan nomenklatur apa? sebab sejak awal Pimpinan tidak menjelaskan dan langsung mempersilakan Para Pengusul untuk menyampaikan kepada kami semua yang ada di Paripurna, kami perlu mengingatkan bahwa tentang hak interpelasi sebagai hak institusi bukan hak Anggota meskipun secara teknis diusulkan sekurang-kurangnya 25 orang Anggota dan lebih 1 orang fraksi. Dalam Pasal 79 ayat (2) dijelaskan ayat (1) dan ayat (2) bahwa hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu yang pertama;</p> <p>Yang kedua : menyangkut pembentukan pansus tidak saja sebenarnya dimaksudkan untuk melaksanakan hak angket. Didalam Pasal 83 ayat (1) huruf i tentang Pembentukan AKD disana disebutkan dan didalam penjelasannya dinyatakan juga secara terang benderang bahwa pansus dibentuk adalah tidak saja dalam rangka melaksanakan untuk pembahasan undang-undang, namun juga bisa dimaksud dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, selain tentu saja untuk menjalankan hak angket. Ketidakjelasan nomenklatur ini sejak awal membuat kita semua bertanya, ketika sejak awal Pimpinan menyampaikan kepada kami tentang adanya rencana dari sebagian Anggota Dewan yang mengusulkan pentingnya pembentukan pansus, maksud kami adalah sejak awal Pimpinan juga menyatakan bahwa pansus yang hendak dibentuk adalah dalam rangka untuk tentu tentang sesuatu yang dianggap urgent dan penting. Yang berikutnya Pimpinan, didalam Pasal 194 UU MD3 juga sudah dijelaskan tentang bagaimana pansus angket itu bekerja, tetapi yang di inginkan adalah pembentukan pansus interpelasi. Interpelasi seharusnya akan lebih mudah jika itu dimajukan oleh sekelompok Anggota Dewan dan dapatkan persetujuan Pimpinan dan dapatkan persetujuan Pimpinan dengan tata cara yang secara teknis disampaikan oleh Saudara Johny G Plate tadi menurut Tatib yang telah kita putuskan bersama dan karena itu semua syarat prosedurnya sesungguhnya tidak dipenuhi didalam rangka pengusulan penggunaan hak interpelasi ini;</p> <p>Pimpinan yang saya hormati dan banggakan, sesungguhnya akan lebih mudah bagi</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|------|---|-----------------|
| | <p>kita menyangkut soal yang memang menimbulkan keprihatinan kita bersama, sesuatu masalah yang cukup besar dan tidak bisa dihindari tentu akan mengugat kesadaran kita bersama untuk berempati dan bersimbpati terhadap apa yang menjadi sebab sekaligus akibat yang timbulkannya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu yang lalu Komisi II juga sudah melakukan satu upaya untuk memanggil beberapa pihak kita meminta keterangan, kita meminta penjelasan apa yang menjadi akar penyebab yang paling penting dari terjadinya kebakaran hutan yang berlangsung secara terus menerus setiap tahun, tidak saja pada Pemerintahan Pak Jokowi tetapi juga pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dari situlah kemudian kita mencoba untuk memahami, menelusuri lebih lanjut dan itu sesungguhnya bisa dilakukan secara intensif oleh setiap komisi yang memiliki kaitan dengan munculnya masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kemudian secara eksesif menimbulkan kabut asap yang kemudian berakibat dalam hal kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dengan demikian sesungguhnya Pimpinan, Pimpinan bisa mendorong kepada semua komisi dan AKD yang lain yang berhubungan dengan soal tersebut yaitu kabut asap yang sudah terjadi dimana-mana dengan berbagai data yang tersedia, informasi yang ada, di 6, 7, 8 provinsi dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga terjadi di 2 (dua) provinsi yang sebelumnya tidak pernah kita duga telah terjadi didaerah tersebut, Sulawesi dan Papua, ini bisa didalami lebih lanjut melalui Komisi II, melalui Komisi III untuk penegakan hukum, melalui Komisi IV dan seterusnya. Dengan demikian seluruh informasi dan data yang akan terkumpul itulah kemudian yang bisa kita rumuskan untuk sampai pada kesimpulan, apakah memang kemudian kita perlu menggunakan hak institusi kita, hak lembaga DPR ini untuk menjalankan apa yang disebut dengan hak interpelasi, jika kemudian hak interpelasi dan kemudian direspon oleh Pemerintah dengan keterangan tidak bisa kita terima maka kita bisa lanjutkan dengan penggunaan hak berikutnya, karena itu Pimpinan ada baiknya dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan kita bersama, maka kemudian kita kembali saja apa yang harus dijalankan oleh masing-masing AKD, komisi-komisi yang terkait untuk mendalami, menyangkut soal yang telah menjadi fenomena secara nasional dan eksesif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa kita secara umum. Itulah Pimpinan, ada baiknya saran kami adalah <u>tidak perlu kita terburu-buru terlalu dini untuk menggunakan hak interpelasi ini</u>, lebih baik adalah memfungskan kembali komisi-komisi untuk didorong secara intensif mendalami tentang sebab musabab dan cara penanganan yang tepat agar kabut asap yang menjadi masalah bagi kita secara</p> | |

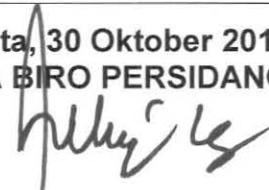
| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|--|--|------------------------|
| | <p><u>bersama-sama bisa segera terselesaikan dengan baik.</u> Demikian pandangan kami Pimpinan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi Pimpinan dan kita bersama dalam mengambil kesimpulan dan keputusan pada Rapat Paripurna yang kami hormat pada malam hari ini. Terima kasih, Wabillahittaufiq walhidayah Wr.Wb.</p> | |
| Dr. BENNY K. HARMAIN, S.H. A-444/F-PD/DAPIL: NTT I | <p>Ini soal hak interpelasi yang kita bahas ini Pak Ketua Pimpinan, jadi memang apa yang telah disampaikan hak interpelasi adalah hak Dewan, tetapi hak Dewan untuk sampai pada tingkat hak ini menjadi hak Dewan, dia harus diajukan oleh Anggota-anggota. Jadi kalau Anggota-anggota mengajukan penggunaan hak angket, hak interpelasi maka silakanlah Rapat Paripurna ini memutuskan apakah setuju hak interpelasi menjadi hak Dewan atau tidak menyetujui. Tadi sudah dibacakan apa yang menjadi latarbelakang usulan ini apa maksud dan tujuannya?, apa targetnya?, kalau melihat latarbelakang maksud dan tujuannya maka luar biasa pengusul ini. Saya bangga dengan teman-teman yang mengusulkan penggunaan hak interpelasi untuk asap ini, saya bangga luar biasa dan sungguh membanggakan apabila saya bandingkan dengan Pansus Pelindo. Pelindo itu tidak ada apa-apanya Pimpinan, kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus, itu kasus kecil tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus, asap ini, ini soal dahsyat, maka sekali lagi saya sampaikan Pimpinan, tolonglah apa yang disampaikan tadi oleh penginisiatif, supaya Dewan menyetujui hak interpelasi untuk kasus asap, tolong segera kita proses dengan meminta pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, apakah kita setuju atau tidak? kalau disetujui Pimpinan, selanjutnya kita melanjutkan mekanismenya, apakah dengan membentuk pansus atau bukan? Silakan kita juga yang menentukan, kami <u>jelas setuju apabila dibentuk pansus untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus asap ini</u>. Jadi soal mekanismenya, soal penggunaan haknya jelas ini adalah hak konstitusional setiap Anggota Dewan untuk mengusulkan kepada Pimpinan, supaya hak ini untuk disetujui menjadi hak kelembagaan Dewan dan kami jelas sangat setuju dan sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sangat sensitif dan responsif dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini yaitu masalah asap. Sekian Pimpinan, terima kasih banyak.</p> | |
| H. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H. A-220/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: KALTENG | <p>Terima kasih Pimpinan yang terhormat, Senafas apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman, berempati terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak asap dan saya menyampaikan terima kasih, tetapi itikad yang baik juga harus ditempuh dengan cara-cara yang baik dan sesuai tata aturan yang ada. Untuk itulah maka seyogyanya mungkin ini dapat dilakukan sesuai tata</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|---|
| | <p>aturan yang sudah disampaikan oleh teman kita dari Fraksi NasDem tadi dan juga menyelami dan merenungkan apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Arif Wibowo bahwa semuanya yang hadir didalam ruangan ini baik pengusul maupun teman-teman yang lain adalah berkeinginan dengan niat tulus, bahwa untuk membantu Pemerintah, untuk menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun ini, berlarut-larut dari masa ke masa agar dapat segera selesai dengan adanya suatu formulasi yang dirumuskan bersama. Untuk itu Pimpinan, saya mengusulkan secara konkrit kalau memang ini bisa dilakukan, karena interpelasi niatnya juga baik, pansus niatnya baik, tapi kata senior saya Pansus Pengawasan itu adalah yang bisa dilakukan, tetapi juga kalau memang harus ada juga cara lain, kalau memang panja gabungan, Pimpinan pada kesempatan Rapat Paripurna ini memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Komisi-komisi yang ada yang terkait yaitu untuk segera membentuk panja dengan sebutan Panja Gabungan atau bagaimanapun namanya yang memang dimungkinkan oleh Tatib kita, ini bisa menjadi jalan tengah, yang paling penting adalah bahwa niat kita sama-sama untuk merumuskan suatu formulasi khusus agar ke depan, tahun depan bahwa bencana asap ini tidak boleh terjadi lagi di Republik Indonesia ini, itu yang paling penting menurut kami. Inilah yang menurut kami, yang menjadi penekanan kami, <u>apapun namanya, yang penting ada sikap DPR RI terhadap masalah ini, apakah dalam bentuk-bentuk panitia apapun, tetapi yang paling penting adalah adanya rumusan bersama</u>, bahwa nantinya kedepan, tahun depan semua stakeholder tahu apa yang harus dilakukan tidak lagi gagap seperti saat sekarang ini. Untuk itu Pimpinan, kami terima kasih Bapak Presiden kami juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang cukup turun kebawah dan satu-satunya presiden yang turun menemui anak suku dalam di Jambi adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, ini merupakan kebanggaan bagi masayarakat kami dan mudah-mudah beliau juga datang ke Kalimantan Tengah, datang kemasyarakatan pedalaman dayak-dayak yang ada disungai-sungai yang ada di Kalimantan itu juga merupakan kebanggaan bagi kami. Kami tunggu Bapak Joko Widodo Presiden kami yang tercinta. Demikian Pimpinan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| ARIA BIMA A-176/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATENG V | <p>Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Pimpinan yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya hormati, Informasi, masukan baik dari pengusul maupun beberapa kawan-kawan yang memberikan catatan dari forum interupsi setelah pengusul menyampaikan cukup bisa kita jadikan untuk mengambil suatu keputusan bersama. Pimpinan saya sepakat, kita</p> | KETUA RAPAT : Wa'alaikumsalam, ini luar biasa, meletik kalau kata bahasa jawanya Mas Aria Bima. Sebelum kita ambil keputusan, apakah itu disepakati atau kita lobby dahulu? |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|--|
| | <p>tidak alergi terhadap pengusul-pengusul Anggota Dewan untuk menggunakan hak DPR baik itu interpelasi maupun angket. Karena itu merupakan suatu instrument kerja kita terkait dengan interpelasi yang diajukan oleh beberapa kawan kita terkait dengan persoalan kebakaran, maupun masalah dampaknya yaitu asap yang berakibat terhadap berbagai hal termasuk kesehatan. Apresiasi saya kepada kawan-kawan yang mengajukan itu juga harus direspon di forum ini, namun satu pihak yang substantif disampaikan oleh kawan-kawan pengusul, kita melihat juga ada beberapa masukan-masukan dari kawan-kawan yang melihat dari cara pandang prosedural dari Tatib, satu pihak kita juga melihat bagaimana persoalan ini tetap dalam ranah fungsi pengawasan kita terkait dengan persoalan-persoalan yang akibat dari beberapa hal termasuk kejahatan kemanusiaan lewat aksi korporasi yang mengabaikan faktor-faktor empati kepedulian terhadap masyarakat khususnya di lingkungan hutan-hutan, maka kita tidak perpanjang lagi interupsi pada malam hari ini karena kita sudah capek sejak pagi, saya mohon Pimpinan bisa menginisiasi untuk kita lobby sebentar dan kita berharap supaya apa yang diusulkan kawan-kawan ini jangan begitu saja ditolak, tapi kita juga melihat bagaimana kita berikan waktu <i>timing</i> yang tepat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk bekerja lebih dulu dan memaksimalkan fungsi pengawasan di komisi-komisi terkait, tapi hal tersebut harus merupakan bagian daripada keputusan Paripurna untuk ada time tertentu kapan interpelasi itu kita gulirkan. <u>Saya sepakat bagaimana interpelasi substansinya itu menjadi hal yang perlu kita catat. Mengenai timing-nya sambil kita lihat kinerja Pemerintah dan mengoptimalkan kerja komisi terkait, kita bicarakan didalam forum lobby untuk kita ambil keputusan.</u> Saya kita itu Pimpinan, saya berharap Pimpinan bisa menginisiasi untuk kita lobby sebentar untuk kita ambil keputusan. Terima kasih, Wasalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| RUHUT SITOMPUL, S.H. A-399/F-PD/DAPIL: SUMUT I | <p>Sejin Piminan, Teman-teman, kasih aku ngomong dikit dong! Mohon pengertiannya, Jadi Pimpinan yang setuju dan tidak setuju, tapi paling tidak kita <i>positive thinking</i> sahabat-sahabat kita yang menginginkan baik panja maupun pansus, apapun kita harus dukung. Saya hanya mengimbau kepada kita semua, memang asap ini menjadi masalah dan rutin tiap tahun, bahkan saya tidak bilang apa, Ketua Umum saya Pak SBY, Presiden yang ke-6 kemarin saja mimpin istiqosah di Sumatera Barat. Ini kita besok reses, jadi kita jangan <i>omdo</i> karena juga ada wartawan, saya mohon 2 (dua) minggu reses ini 560 orang ini ada dong turun juga begitu. Bapak Presiden kita</p> | KETUA RAPAT : Baik, barangkali sudah banyak kita pengayaan meteri disini, kita sepakat untuk kita lobby ya, barang sebentar 15 menit di depan meja sini saja, tidak ada masalah, prinsipnya kita menghormati tidak menghalangi dari setiap hak Anggota yang ada didalam kaitan Tatib kita. Kita lobby sebentar 10 menit bisa |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|-------------|--|---|
| | Pak Jokowi saja dari Amerika langsung ke Sumatera Selatan dan contoh yang paling kecil, kawan-kawan waktu pulang, itu kotak yang dipajang di luar belum sampai Rp. 1.000.000,- sumbangan belum sampai sejuta rupiah, nanti waktu pulang tolong kawan-kawan ya! yang ada punya 100.000, 1.000.000, 5.000.000, contohlah Pimpinan kita satu orang 10 juta. Mari kita dukung Pemerintah, mari kita DPR turun ke titik-titik sumber api itu, terima kasih Pimpinan, selamat reses. | didepan, kita skors ya? ketok palu, setuju. |

KETUA RAPAT :
Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan seluruh Anggota DPR yang kami cintai semua,
Sesuai dengan apa yang disampaikan didalam lobby, 10 menit dengan teman-teman Pimpinan Fraksi dan pengusul, maka tadi disepakati :
1. Apapun yang merupakan hak Anggota, hak eksklusif kita bersama, tetap harus kita hargai dan hormati sesuai dengan kaidah-kaidah MD3 kita;
2. Disepakati tadi, bahwa prinsipnya ini adalah salah satu bentuk kepedulian bersama terhadap proses maupun kondisi yang sedang kita mengalami proses keprihatinan karena adanya bencana asap, yang tentunya ini menjadi masalah kita dalam kaitan merespon dari keresahan maupun derita dari masyarakat yang sedang mengalami proses bencana asap tersebut, tentunya dengan segala hormat, kita tetap menempatkan dan menghargai masukan, usulan dari interpelasi yang sampaikan oleh Pengusul dan tadi telah disepakati karena ada beberapa hal yang barangkali tadi disampaikan jadi oleh Pengusul untuk dilengkapi persyaratan lebih detail kembali dan sesuai mekanisme Tatib, maka dalam kaitan ini telah disepakati untuk draft maupun dokumentasi dalam kaitan pengajuan usul interpelasi tersebut, sementara dikembalikan terlebih dahulu kepada pihak Pengusul dan setelah reses, nanti kita bahas. Dan sekaligus pengumuman untuk dimulai usulan interpelasi ini, setuju? Ketok palu.
Baik terima kasih atas persetujuannya.

Jakarta, 30 Oktober 2015
KEPALA BIRO PERSIDANGAN,

Drs. HELMIZAR
NIP. 196407191991031001